

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia (Indonesia, 2016) tentang Desa yang dikenal dengan nama Undang-Undang Desa sebagai salah satu upaya dalam melakukan percepatan pembangunan nasional dan mengatasi kesenjangan dalam pembangunan khususnya di daerah pedesaan. Undang-Undang Desa diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menciptakan desa yang mandiri secara politik dan ekonomi yang memiliki landasan sosial, budaya dan kearifan lokal yang kuat (Karyada et al., 2020). Dengan demikian desa tidak lagi menjadi wilayah yang terbelakang. Namun, desa dapat menjadi pusat perkembangan wilayah melalui penyaluran dana desa. Setiap desa yang ada di Indonesia mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBN. Dana tersebut berasal dari APBN selanjutnya diberikan secara bertahap melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Alokasi dana desa tersebut merupakan dorongan bagi desa untuk berbenah diri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan dapat menggunakan dana tersebut untuk program pengembangan masyarakat, memperkuat perekonomian desa, tentunya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa. Untuk mewujudkan terlaksananya program tersebut, sarana yang dapat mendorong pengembangan dan pemanfaatan potensi desa ialah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu mandat penting yang tercantum dalam Undang-Undang Desa (Setyobakti, 2017). BUMDes memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa serta diharapkan dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional (Ridwan, 2015). Pengertian BUMDes (UU Nomor 6 Tahun 2014) yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes seutuhnya di kelola oleh masyarakat desa, dari desa, oleh desa dan untuk desa. Salah satu bentuk terlaksananya BUMDes yang baik dapat dilihat dari penerapan prinsip akuntansi yang tepat dan benar. BUMDES merupakan suatu lembaga yang didasari oleh landasan hukum. Oleh karena itu, penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan harus berlandaskan standar keuangan, hal tersebut menjadi acuan yang kuat dalam kepercayaan dan keterbukaan atas keuangan yang dikelola BUMDes dari semua pihak (Saputra et al., 2019).

Indonesia sendiri memiliki tiga standar akuntansi yang digunakan untuk semua perusahaan dan satu dasar akuntansi untuk organisasi pemerintahan. Standar akuntansi tersebut bertujuan memastikan konsistensi laporan keuangan serta memudahkan penyusunan laporan keuangan. Metode penyusunan laporan keuangan BUMDes disesuaikan dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau disingkat dengan SAK ETAP. Laporan keuangan yang disajikan dalam SAK ETAP meliputi sebagai berikut; neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: (1) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau (2) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi (SAK ETAP ; 2009).

BUMDes Gunung Mulia merupakan salah satu BUMDes yang terletak di desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember . Bumdes Gunung Mulia didirikan tahun 2016. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama bapak Bambang selaku sekretaris yang menyusun

laporan keuangan BUMdes Gunung Mulia ,BUMDes Gunung Mulia memiliki beberapa usaha yaitu pasar desa,Griya bayar(pembayar wifi, listrik, perpanjangan pajak motor), pande besi, jasa pemasangan dan layanan wifi internet, toko ATK, agen46 (buka tabungan,setoran tunai,tarik tunai). Namun selama masa pandemi, beberapa unit usaha tidak beraktifitas seperti biasa atau fakum.

MARET 2021					
NO	TANGGAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	01 Maret 2021	Saldo kas bulan Pebruari 2021	14.866.940		14.866.940
2	01 Maret 2021	Terima angsuran P. Sakur	100.000		14.966.940
3	01 Maret 2021	Terima angsuran P. Tugiman	200.000		15.166.940
4	01 Maret 2021	Terima dari P. Bunari	200.000		15.366.940
5	13 Maret 2021	Beli karcis los pasar		200.000	15.166.940
6	13 Maret 2021	Beli isolasi		5.000	15.161.940
7	14 Maret 2021	Beli stop kontak & pitingan		79.000	15.082.940
8	15 Maret 2021	Beli oli tap		20.000	15.062.940
9	16 Maret 2021	Setor BNI 46		6.000.000	9.062.940
10	16 Maret 2021	Transport ke BNI		20.000	9.042.940
11	17 Maret 2021	Beli kabel & lampu untuk pasar sore		242.500	8.800.440
12	20 Maret 2021	Jual air 2 dus	28.000		8.828.440
13	20 Maret 2021	Beli Nota Bumdes 1 rim		270.000	8.558.440
14	25 Maret 2021	jual air 4 dus	60.000		8.618.440
15	28 Maret 2021	Terima angsuran P. Tugiman	200.000		8.818.440
16	28 Maret 2021	Terima angsuran P. Sakur	100.000		8.918.440
17	29 Maret 2021	Ongkos tukang talang pasar		300.000	8.618.440
18	29 Maret 2021	Dipinjam Nita Nilam		500.000	8.118.440
19	29 Maret 2021	Beli isolasi		7.000	8.111.440
20	31 Maret 2021	Bayar PDAM		133.000	7.978.440
21	31 Maret 2021	Terima dari distribusi parkir sepeda	1.550.000		9.528.440
22	31 Maret 2021	Terima dari Los pasar	1.967.000		11.495.440
23	31 Maret 2021	Terima dari Internet	600.000		12.095.440
24	31 Maret 2021	Terima dari Toko	945.000		13.040.440
25	31 Maret 2021	Terima tagihan PLN & PDAM Maret 21	4.465.000		17.505.440
Jumlah			25.281.940	7.776.500	17.505.440

Gambar 1. 1 Catatan keuangan BUMDes Gunung Mulia Tahun 2021

Sumber : BUMDes Gunung Mulia tahun 2021

Pengelola BUMDes Gunung Mulia menyusun laporan pertanggungjawaban setiap 1 tahun sekali. Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban terakhir disusun pada tahun 2021, bapak Bambang selaku sekretaris BUMDes mengatakan bahwa penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes terakhir kali dilakukan pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2020-2021 BUMDes Gunung Mulia tidak menerimanya penyertaan dana dari pemerintah desa serta dalam 2 tahun tersebut dilanda pandemi covid-19 sehingga BUMDes tidak melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Proses pencatatan Akuntansi ditahun 2020 dan 2021 yang dilakukan oleh Bapak Bambang selaku pengelola BUMDes Gunung Mulia hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan dari seluruh unit usaha BUMDes Gunung Mulia, catatan tersebut masih berbentuk data excel sebagai Laporan Pertanggung Jawaban atas kinerja BUMDes Gunung Mulia selama satu tahun berjalan. Pengelola BUMDes belum mencatat secara terpisah catatan keuangan tiap-tiap unit usahanya, catatan transaksi tiap unit yang disajikan belum detail, seperti stok barang yang ada pada unit usaha toko ATK, biaya listrik dan air setiap unit usah, dsb. Dapat dilihat dari gambar tersebut, pengelola melakukan proses pencatatan akuntansi secara sederhana dan belum cukup detail. Dalam hal ini penyusunan laporan keuangan BUMDes Gunung Mulia belum menerapkan SAK ETAP. Pengelola BUMDes harusnya dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP sehingga laporan tersebut dapat digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi serta menjadi sumber acuan dalam pengambilan keputusan dimasa depan. Penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes karena laporan keuangan yang disusun menggunakan SAK ETAP mempunyai kelengkapan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan (Adilah & Rani, 2020).

Oleh karena itu penulis memutuskan untuk meneliti Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes Gunung Mulia tahun 2021. Pada Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2021 pengelola BUMDes hanya menyajikan laporan keuangan berupa transaksi pengeluaran dari semua unit usaha BUMDes. Pengelola BUMDes juga belum mencatat secara terpisah catatan keuangan tiap-tiap unit usahanya, tentunya penyusunan LPJ tahun 2021 belum menerapkan SAK ETAP. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya

pengetahuan dan pemahaman pengelola BUMDes mengenai proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana rekonstruksi laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes Gunung Mulia tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan BUMDes Gunung Mulia pada tahun 2021?
2. Bagaimana penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes Gunung Mulia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis laporan keuangan BUMDes Gunung Mulia
2. Merekonstruksi laporan keuangan BUMDes Gunung Mulia

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi peneliti, ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga membantu merekonstruksi Laporan Keuangan BUMDes. Berikut manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti :

1. Bagi Lembaga Pendidikan / Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian materi perkuliahan yang tentunya berkaitan dengan rekonstruksi laporan keuangan BUMDes.
2. Bagi BUMDes
Penelitian ini juga diharapkan mampu menggambarkan serta menjadi ilmu baru ataupun bahan evaluasi untuk memperbaiki penyusunan laporan keuangan BUMDes berdasarkan SAK ETAP.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini dapat menambah informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait rekonstruksi laporan keuangan BUMDes Gunung Mulia berdasarkan SAK ETAP.
4. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat desa Grenden terkait laporan keuangan BUMDes berdasarkan SAK ETAP dimana dapat menjadi upaya mengembangkan BUMDes Grenden yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.